



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**“ANALISIS PERBANDINGAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG
SEBELUM DAN SETELAH PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE”**

SKRIPSI



**RIZKI RAMADHAN
11102532108**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

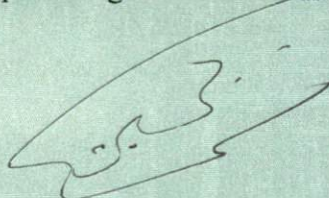
Nama : **Rizki Ramadhan**
No. BP : 1110532108
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul : **Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang
Sebelum dan Setelah Pembayaran Pajak Secara
Online**

Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 22 Juni 2015 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 10 Oktober 2015

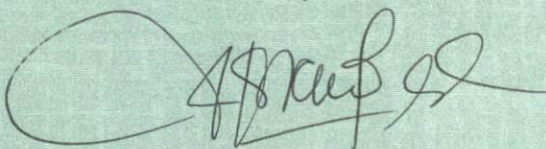
Kepala Program Studi Akuntansi

Pembimbing



Verni Juita, SE, M.Com (Adv), Ak, CA

NIP. 197906182002122004



Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, CA, Ak

NIP.196304071989012001

	No Alumni Universitas	RIZKI RAMADHAN	No Alumni Fakultas
<p style="text-align: center;">BIODATA</p> <p>a). Tempat/Tgl Lahir: Tanah Datar / 26 Februari 1994 b). Nama Orang Tua : Zahari c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 1110532108 f). Tanggal Lulus : 5 Oktober 2015 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,12 i). Lama Studi : 4 tahun 2 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Raya Batusangkar-Padang, Kec Pariangan, Tanah Datar.</p>			

Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sebelum dan Setelah Pembayaran Pajak Secara *Online*

Skripsi Oleh Rizki Ramadhan

Pembimbing Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, CA, Ak

ABSTRACT

This research have the intention of examining the comparison of Local Tax contribution for Padang City PAD before and after the implementation of online tax payment system. This study uses descriptive quantitative test. This research uses contribution analysis to examine the contribution that given by Local Tax for Padang City PAD and also undergo T-Test to compare the contribution before and after the implementation of online tax payment system. The source of primary data in this test is obtained from direct interview with DPKA Kota Padang an for secondary data is obtained from realization versus target of local tax revenue and Padang City PAD data.

The result of this research showed that the contribution given by Local Tax for Padang City PAD is getting decreased after the implementation of online tax payment system, also the ratio comparison between manual payment system and online payment system is significant.

Keywords: *Local Tax, Padang City PAD, online tax payment*

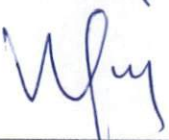
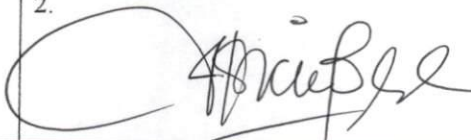
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbandingan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD kota Padang sebelum dan setelah pembayaran pajak secara *online*. Jenis pengujian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kontribusi untuk menguji kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang dan juga melakukan uji T-Test untuk membandingkan kontribusi tersebut sebelum dan setelah sistem pembayaran pajak secara *online*. Sumber data yang diperoleh dalam pengujian ini berupa data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak DPKA Kota Padang dan data sekunder berupa data realisasi dan target pendapatan Pajak Daerah dan PAD Kota Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang semakin menurun setelah dilakukannya sistem pembayaran secara *online*, serta perbandingan saat pembayaran dilakukan secara manual dan saat dilakukan secara *online* adalah signifikan

Kata Kunci: Pajak Daerah, PAD Kota Padang, pembayaran pajak *online*

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Juni 2015, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
	Nama Terang Dra. Warnida, MM, CA, Ak	Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, CA, Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi: **Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak**
NIP. 197205021996021001 Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sebelum dan Setelah Pembayaran Pajak Secara *Online*

merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 10 Oktober 2015
Yang Memberi Pernyataan



Rizki Ramadhan

No. BP : 1110532108

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNYA yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sebelum Dan Setelah Sistem Pembayaran Pajak SecaraOnline”** ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dan berkontribusi memberikan bantuan, nasehat dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada ayah dan ibu tercinta. Yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan apapun. Terimakasih untuk tetap selalu sabar dan selalu menjadi pendengar terbaik. Semoga penulis dapat selalu membahagiakan kalian. Love u Ibu Dewi dan Ayah Zahari.
2. Untuk Abang Rahmat Diaz, Dedek Muhammad Arief Diaz, Kakak Rizkika Mutiara Az-Zahra, dan Adek Muhammad Arka Diaz, terimakasih sudah menjadi sahabat, teman, musuh dan partner terbaik dirumah. I love U.
3. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, beserta seluruh jajarannya.

4. Bapak Dr. Efa Yonnedi SE, MPPM, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Firdaus SE, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
6. Ibu Verni Juita SE, M.Com (adv), Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Strata-I yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga kepada penulis saat menjadi dosen penguji pada ujian komprehensif penulis.
7. Kepada Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, CA, Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan membantu penulis selama penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan dan ilmunya. Terimakasih juga telah sabar dalam membimbing penulis.
8. Bu Dra. Warnida, MM, CA, Ak, selaku penelaah skripsi yang telah memberikan masukan dan saran-saran, yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi sehingga menjadi lebih baik.
9. Bapak Drs, A. Rizal Putra, M.Si, Ak, selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan masukan, saran dan motivasi kepada penulis.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang diberikan dari awal hingga akhir.
11. Kepada para pegawai Biro Jurusan Akuntansi, Da Ari dan Ni Efa yang telah turut membantu mengurus segala berkas-berkas penulis serta pegawai ICT dan Dekanat terimakasih atas bantuannya.

12. Best CS, Khairanda Satria, Lieke Febrinia, Djorgi Aprilio dan Ayu Wisya.
Terimakasih sudah menjadi penghibur dikala sedih, penyemangat dikala penulīs gaīau, pengacau, pelīndung, pendūkung setia penulīs. Penuīs sayang kalian, aaaaaa wkwkwk. Alhamdullilah kita semua sudah lulus, see u on top ma best.
13. Koncek akuh, Bang Ipaik, Uni Arnovenny, Uda Adi Jayo, Uni Nica Zhu, dan Madu Anesti. Thank u for everything guys, sukses ya kita kedepannya. Semoga persahabatan ini tak lekang oleh waktu. Mendaki lagi yuk~ ahaha. Buat Bang Ipaik cepet menyusul ya bang, gue tau lo pinter ahaha. Uni Venny sukses ya, jadilah panutan yang baik. Uda adi, jangan cepet-cepet lulus, koas aja dulu. Kak nisa, manikah lah lai, lahirkan anak-anak yang lucu ya. Madu, sama-sama ya wisuda november aku tunggu kamu loh. Pasukan, siap grak!
14. Finance Freak, Bundara, Adek Awi, Kaka Ve. Makasi udah jadi best team 14/15, iya ga sih ? haha. Sukses untuk menjadi internal auditor ya ibu, sukses jadi Vp ya adek awi. Sukses juga Uni Agam, semoga menjadi duta yang amanah.
15. LCHH yang selalu akur, untuk semua VP semoga selalu giat dalam mengemban tugas yang telah dilimpahkan kepada kalian orang-orang yang terpilih. Saya bangga dengan pencapaian yang kalian raih ahaha. Buat Cimew, Ciwiw, Cibin, Cive, Cinda, Cidan, Ciat, Cigy, dengan additional member cincin ahahahaha. Ciki bangga dengan kalian.
16. Op Kawen, genk calaq. Buat Heru, Rangga, Sahabat aku Ayai, Anggi dan Tari terimakasih sudah menjadi tempat pelampiasan keīuh kesah penulīs

selama perkuliahan. Keep calm and love accounting ya guysahaha. Buat Heru, Ranga capek lulus yo kawen, buat Tari cepet dapat kerja ya kecil terimakasih sudah membantu penulis dalam berbagai hal, semangat skripsian sahabat, jangan ada yang gantiin posisi gue. Anggi ibu auditor kita, stay pretty ya sahabat udah itu aja.

17. Buat teman-teman sahabat selama kuliah, yayan alay, verisa hits, rini artis, nona choebank, angga bule, bang randa, kak rezi, abet rundang, dhanu gaul, isil asdos. Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan. Kalian merupakan alasan kenapa penulis harus masuk kelas setiap harinya dan teman - teman Akuntansi angkatan 2011 yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
18. Eli nya orang, teman seperjuangan, seperskripsian, seperkampungan, sepersusahan. Terimakasih selalu jadi reminder buat penulis. Ga usah wisuda bareng! Kamu yang terbaik.
19. Untuk adek-adek super yang selalu mendukung penulis dikala susah maupun senang, terimakasih sudah menjadi orang-orang yang dapat dibanggakan Nadia Cherry, Iffah Serry dan Master Brian. So Proud of You
tepuk tangan
20. My best supervisor, adek, teman tertawa. Terimakasih dari dalam hati Bebe. Semangat menjalani hari-hari mu ya.
21. Oprecium, anak-anak kebanggaan dan tagok. Terimakasih sudah mempercayakan abang sebagai leader kalian. Tetap jadi team yang solid ya. Kasih cinta buat Yeyen, Mila, Dani Vipa, Rayhan, Rida dan Ani yang selalu berencana.

22. For my beloved BBMsKi, Papah my best advisor, Meme, Fandra, Syarah, Nisa, Tisa terimakasih sudah mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya. Tuhan kan berikan jalan~ nanana

23. Untuk Management Board AIESEC UNAND 14/15 Supernova. Terimakasih sudah memberikan kenangan yang luar biasa dalam setahun terakhir. Kalian orang-orang hebat. Bener ga tuh ?

24. Kiki Riski dan Ahmad Satriadi, sang relawan muda harapan bangsa. Semangat untuk semua project sosialnya. Happy internship for ma best buci ever, jepang menantimu. Untuk pak ahmad sukses di Pilkada ya pak.

25. Buat Kak Nonok dan Bang Eka, terimakasih sudah menjadi mentor terbaik. Sukses di kehidupan kalian. Doakan aku menyusul secepatnya ya.

26. Untuk Keluarga Besar AIESEC UNAND dan ORIMOON, terimakasih untuk ilmu dan pengalaman yang diberikan selama ini kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini akan dibalas oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak.

Padang, 10 Oktober 2015

Penulis,

Rizki Ramadhan

1110532108

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	10

BAB II : LANDASAN TEORI

2.1 Pajak	12
2.1.1 Defenisi Pajak	12
2.1.2 Fungsi Pajak	13
2.1.3 Teori Pemungutan Pajak.....	14
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	15
2.1.5 Pengelompokan Pajak.....	16
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	17
2.1.7 Asas Pemungutan Pajak.....	18
2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	19
2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak.....	20

2.2 Pendapatan Asli Daerah	20
2.3 Pajak Daerah	21
2.3.1 Jenis Pajak Daerah.....	22
2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	27
2.4 Pajak Online	28
2.4.1 E-Filling.....	28
2.4.2 Syarat Untuk Dapat Melakukan e-Filling.....	29
2.4.3 E-Billing	29
2.4.4 E-SPT.....	29
2.4.5 E-Registration.....	30
2.5 Pajak Online di Kota Padang	30
2.6 Review Penelitian Sebelumnya.....	31
2.7 Kerangka Berpikir.....	33
2.8 Pengembangan Hipotesis	34

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Variabel Penelitian.....	35
3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4.1 Sumber Data	36
3.4.1 Metode Pengumpulan Data	37
3.4 Metode Analisis Data.....	38
3.4.1 Analisis Kontribusi	38
3.4.2 Uji T-Test	39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara online di Kota Padang	41
4.1.1 Pajak Online di Kota Padang	41
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang.....	44
4.1.3 Struktur Organisasi DPKA Kota Padang.....	50

4.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Sebelum Pembayaran Pajak Daerah Secara Online.....	51
4.3 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Setelah Pembayaran Pajak Daerah Secara Online	55
4.4 Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan PAD Sebelum dan Sesudah Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i>	60
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	65

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	68
5.3 Saran	69
5.4 Implementasi Penelitian.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2011	52
Tabel 4.2 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2012	53
Tabel 4.3 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2013	56
Tabel 4.4 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2014	58
Tabel 4.5 Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov.....	62
Tabel 4.6 Hasil Uji Paired T-Test.....	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Paired T-Test.....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Paired T-Test.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Alur Pembayaran Pajak Daerah Secara Online.....	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPKA Kota Padang.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penerimaan Pajak Daerah tahun 2007-2014	73
Lampiran 2 Hasil Uji <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	74
Lampiran 3 Hasil Uji Paired T-Test	74
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian KASBANGPOL	76
Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara berkembang yang masih mempunyai banyak masalah di berbagai sektor. Saat ini, Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan demi mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan masyarakatnya. Banyaknya masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia seperti turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain, tingginya biaya hidup dan naiknya harga minyak dan bbm menyebabkan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi pemerintah pada saat sekarang ini. Namun, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah membutuhkan dana yang harus disiapkan untuk melakukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Dana tersebut ada yang datang dari dalam negeri dan ada yang datang dari luar negeri. Dana luar negeri biasanya didapatkan dari meminjam dana di bank dunia atau menerima hibah dari negara lain. Sedangkan, untuk dana dari dalam negeri seperti pertambangan, hasil pertanian dan salah satunya yang terbesar adalah dari pemungutan pajak. Seperti yang kita ketahui, pemerintah sudah memiliki hutang luar negeri cukup banyak. Oleh karena itu pemerintah tidak terlalu bergantung terhadap pendanaan luar negeri untuk membiayai kegiatan pembangunan dan upaya mensejahterakan masyarakat. Sumber dana lain

yang digunakan dan bersumber dari dalam negeri yang akan dimaksimalkan pemerintah seperti penerimaan pajak.

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Struktur penerimaan Negara dalam APBN menempatkan penerimaan sektor pajak sebagai pos penerimaan terbesar. Berdasarkan jenisnya pajak penghasilan (PPH) telah memberikan kontribusi terbesar. Tanggung jawab terhadap pembayaran pajak berada pada wajib pajak itu sendiri. Kebanyakan wajib pajak merasa enggan membayar pajak dikarenakan banyaknya tahap yang harus dilalui dan rumitnya sistem pembayaran pajak. Kewajiban pemerintah hanya memberikan penyuluhan, edukasi, pelayanan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang akan membayar pajak.

Begitu pula dengan pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001, pemerintah daerah dapat mengatur pendapatan daerahnya sendiri sehingga dapat menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Menurut undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ada tiga kelompok sumber pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) Pajak Daerah
 - b) Retribusi daerah, termasuk dari hasil pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah.

- c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, antara lain laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
 - d) Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti hibah

Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dianggap lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah Sedangkan bentuk pemberian Pemerintah Pusat sifatnya lebih terikat. Daerah dapat menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial seperti Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur mengenai Pajak Daerah. Dimana menurut Undang-undang tersebut, Pajak daerah dibagi dua, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang termasuk ke dalam pajak propinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan

Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Banyaknya pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, akan banyak pula tugas pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan pajak. Hal ini sangat dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang. Perspektif hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulkan kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan system self assegment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak sendiri. Sehingga mengharuskan wajib pajak mengenal bagaimana tata cara perpajakan. Wajib pajak orang pribadi (OP) dapat menggunakan dua cara perhitungan pertama dengan menggunakan norma dan yang kedua dengan cara pembukuan. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak badan menggunakan pembukuan disamping menggunakan laporan keuangan komersial, dan membuat laporan keuangan fiskal yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan.

Dengan sedemikian kompleksnya alasan wajib pajak untuk enggan membayar pajak mereka, pemerintah Indonesia mulai meluncurkan sistem baru untuk wajib pajak yang akan membayar pajak mereka. Baru-baru ini pemerintah meluncurkan

pajak online yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Pajak online sudah diluncurkan di beberapa provinsi dan diharapkan akan ada di setiap daerah. Sehingga dengan adanya pajak online dapat menjadi media baru bagi wajib pajak yang tidak memiliki cukup waktu dalam melakukan pembayaran pajak manual yang sebelumnya mereka lakukan.

Pada tahun 2013, pemerintah Kota Padang meluncurkan pajak online di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang mengharapkan dengan adanya pajak online ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajak mereka. Kesadaran wajib pajak bisa dikatakan rendah pada saat pembayaran pajak secara manual. Banyak wajib pajak yang merasa rumit dan susah dalam sistem pembayaran pajak yang dulu (padangmedia.com). Pembayaran pajak secara online diharapkan dapat memenuhi target penerimaan pajak di Kota Padang yang sampai saat ini masih mengalami hambatan dalam memungut pajak yang telah dihutangkan kepada wajib pajak sehingga dapat menambah pendapatan daerah di sektor penerimaan pajak.

Sekaligus tahun ini merupakan pelaksanaan atas pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat. Hal itu menyebabkan bertambahnya wajib pajak daerah Kota Padang sebanyak 208.000 wajib pajak dengan potensi sebesar Rp38 miliar. Pemko Padang meluncurkan sistem layanan Pajak Daerah secara online di Balai Kota Padang. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Padang, BNI Cabang Padang, dan Bank Nagari ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan layanan pajak daerah online ini. Dengan sistem online itu, tingkat

kebocoran atau penyalahgunaan pajak dapat diminimalisir. Dalam layanan pajak daerah online diberlakukan untuk 11 item pajak.

Pajak daerah yang dapat dibayar secara online adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Restoran
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Air Bawah Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (padangmedia.com).

Pemerintah Kota Padang sebelumnya juga telah banyak melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak kepada masyarakat di Kota Padang. Hal ini diperkuat dengan penandatanganan MoU dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah (DPJ Kanwil) Sumbar Jambi di Ruang Sidang Abu Bakar Jaar, Balaikota Padang. MoU ini memungkinkan kedua pihak melakukan kerjasama, baik dalam

pendataan, maupun dalam melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pajak (nusantaranews.com).

Pemerintah Kota Padang juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak mereka. Sebagai apresiasi dari kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak serta sekaligus sebagai ucapan terima kasih Pemko Padang, maka diberikan penghargaan kepada wajib pajak yang dinilai berhasil dan memiliki kesadaran serta ketaatan yang baik dalam membayar pajak. Sehingga diharapkan dengan pemberian penghargaan tersebut dapat meningkatkan minat wajib pajak lainnya dalam membayar pajaknya (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang).

Selain itu DPKA Kota Padang juga mengadakan Pemilihan Duta Pajak untuk membantu mensosialisasikan pajak kepada masyarakat diberbagai kalangan. Dengan terpilihnya duta pajak yang merupakan anak muda, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak terlebih Wajib Pajak muda. Banyaknya upaya yang dilakukan pemerintah diharapkan menambah penerimaan pajak di Kota Padang.

Sehubungan dengan itu Ketua DPRD Kota Padang Zulherman, menyatakan dengan mulai diberlakukannya pembayaran pajak semacam itu, maka akan berdampak baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem pembayaran pajak online akan memudahkan masyarakat, dan juga diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak itu sendiri, sebab pembayarannya akan lebih mudah, dan efisien (eksposnews.com).

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pembayaran Pajak Daerah secara *online*. Penelitian ini menunjukkan penerapan sistem pajak online yang baru saja diluncurkan yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Padang.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana sistem pembayaran pajak secara *online* di kota Padang ?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD kota Padang sebelum pembayaran Pajak Daerah secara *online* ?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD kota Padang sesudah pembayaran Pajak Daerah secara *online* ?
4. Bagaimana perbandingan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD sebelum dan sesudah pembayaran Pajak Daerah secara *online* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembayaran pajak secara *online* di kota Padang.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD kota Padang sebelum pembayaran pajak secara *online*.
3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD kota Padang sesudah pembayaran pajak secara *online*.
4. Untuk mengetahui perbandingan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD kota Padang sebelum dan sesudah pembayaran pajak secara *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama tentang Pajak online .

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah Kota Padang sehingga bisa melakukan evaluasi kedepannya.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan penelitian, diantaranya :

1. Variabel yang diteliti yaitu adalah Pajak Daerah yang dibayar secara *online* dan *offline*.
2. Penelitian dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat.
3. Data diperoleh dari DPKA Kota Padang, yaitu penerimaan PAD dan Pajak Daerah Kota Padang tahun 2011 – 2014.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan ini dibagi menjadi 5 bab pembahasan dengan sistematika penyajian pada Bab I yaitu pendahuluan menguraikan latar, manfaat, tujuan dan batasan dalam penelitian ini. Selain itu juga menguraikan mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini. Selanjutnya Bab 2 yaitu landasan teori, Bab ini menguraikan teori-teori mengenai Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan

Pajak *Online*. Bab 3 yaitu membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang menguraikan mengenai jenis penelitian, variabel penelitian, sumber dan pengumpulan data dan metode analisis data. Selanjutnya Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kontribusi pembayaran pajak daerah secara online terhadap penerimaan PAD Kota Padang. Pada bab terakhir yaitu Bab 5, membahas mengenai kesimpulan, bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil analisis yang dilakukan serta saran sebagai masukan terhadap penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumitro mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang berasal langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013:1).

Smeets menyatakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2011:3).

Dari pengertian pajak diatas menurut Mardiasmo (2013:1) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undangserta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1) fungsi pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori- teori tersebut antara lain (Mardiasmo, 2013:3) :

1. Teori Asuransi.

Negara melindungi keselamatan jiwa , harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh amanan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b. *Unsur subjektif*, engan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak padahubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalh sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:2), syarat-syarat pemungutan pajak yakni sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik bagi negara maupun Warga Negara Indonesia.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi dari Wajib Pajak.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya pemungutan pajak tidak terlalu besar.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5) pengelompokan pajak digolongkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya sebagai berikut :

1. Jenis-jenis pajak menurut golongannya yaitu :

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

- b. Pajak tidak langsung yaitu beban pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain.
2. Jenis pajak menurut sifatnya yaitu :
- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan keadaan Wajib Pajak dari segi kemampuan ekonominya.
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang melihat pada objek pajaknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
3. Menurut lembaga pemungutnya yaitu :
- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga system (Mardiasmo, 2013:7), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.7 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) terdapat tiga macam asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili

Negara berhak mngenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang, seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan (Mardiasmo, 2013:8).

2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:8), hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak disebabkan antara lain karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Darise (2007:38) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan pembangunan daerah.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah (local taxes receipt)
2. Retribusi Daerah (retribution receipt)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (output of separated regional government wealth)
4. Lain-Lain PAD yang Sah (other local government original receipt) yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi menurut Mardiasmo tersebut juga sama dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1. Dasar hukum pajak daerah selain seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Pajak Daerah (Mardiasmo, 2013:12).

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.1 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis-jenis Pajak Daerah adalah:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan

disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek dari pajak ini adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan oleh kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar kendaraan yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan/minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah

perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

1. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. Sistem *Self Assessment*

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 34

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

2.4 Pajak Online

2.4.1 E-filing

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). E-Filing dapat menjadi alternatif penyampaian SPT tahunan yang praktis dan dapat dilakukan dimanapun, kapanpun selama terhubung di jaringan internet.

2.4.2 Syarat Untuk Dapat Melakukan e-Filling

Menurut Djoko Muljono (2008:5), wajib pajak yang akan menyampaikan SPT dengan e-SPT harus memenuhi syarat berikut ini :

5. Memiliki *Electronic Filling Identification Number* (eFIN),
6. Memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari Direktorat Jenderal Pajak.

Electronic Filling Identification Number (eFIN) adalah nomer identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filling)

2.4.3 E-Billing

E-Billing adalah suatu cara pembayaran pajak terutang dari seorang wajib pajak melalui fasilitas internet banking maupun pembayaran melalui ATM. E-Billing membantu wajib pajak dalam membayar pajak dengan lebih fleksibel, cepat, mudah dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

2.4.4 E-SPT

E-SPT adalah SPT secara elektronik dengan menggunakan media elektronik seperti disket dan sejenisnya, yang programnya telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Isi e-SPT sama dengan SPT dengan menggunakan media kertas yang harus disampaikan langsung ke KPP, KP2KP atau lewat perusahaan jasa pengiriman termasuk Kantor Pos.

Yang membedakan antara e-SPT dengan SPT dalam media kertas adalah, data yang terdapat pada e-SPT tinggal dipindahkan kedalam Master File Wajib Pajak, tanpa harus merekam lagi seperti pada SPT yang menggunakan media kertas. Istilah e-SPT juga digunakan dalam SPT pada e-Filling, bedanya pada e-Filling harus menggunakan media internet dan memakai jasa perusahaan ASP (Djoko Muljono, 2008:5).

2.4.5 E-Registration

Menurut Djoko Muljono (2008) sistem e-Registration (e-Reg) adalah pendaftaran, penghapusan, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan serta pencabutan pengukuhan PKP melalui sistem yang terhubung langsung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak.

2.5 Pajak Online di Kota Padang

Pajak Online merupakan cara pembayaran Pajak Daerah yang baru-baru ini diluncurkan Pemerintah Kota Padang. Pembayaran pajak secara online dahulunya hanya dapat dilakukan untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus pegawai negeri, namun Pemerintah Indonesia memperluas jangkauan pembayaran online terhadap Pajak Daerah disetiap propinsi yang ada di Indonesia.

Secara resmi Pemerintah Kota Padang pada tahun 2013 memberlakukan sistem online terhadap pembayaran Pajak Daerah. Pemerintah Kota Padang secara resmi mengganti sistem pembayaran Pajak Daerah secara manual menjadi *full online* dan berkerjasama dengan bank-bank yang mempermudah pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang ingin menyetorkan pajak terutangnya. Bank-bank tersebut terdiri dari tiga bank diantaranya Bank BNI, Bank BTN dan Bank Nagari. Menurut bapak Noviardi Sudarta selaku pegawai bagian aplikasi sistem informasi DPKA Kota Padang menyebutkan bahwa dalam waktu dekat Pemerintah Kota Padang akan melakukan kerjasama dengan bank-bank lainnya yang akan mempermudah pembayaran pajak masyarakat. Bank BRI akan menjadi bank yang selanjutnya akan melakukan kerjasama dengan Pemko Padang diharapkan berjalan mulai pertengahan tahun ini.

Pada awalnya kesebelas item Pajak Daerah diterapkan sistem online dalam pembayarannya. Namun, pada prakteknya pajak reklame masih dilakukan sistem pembayaran secara manual. Sehingga sampai saat sekarang ini hanya terdapat sepuluh item Pajak Daerah yang dibayar secara online.

2.6 Review Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pajak online atau kontribusi pajak daerah terhadap PAD sudah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya oleh Susilowati (2013) mengenai Analisis dan Evaluasi Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) di Kota Padang. Susilowati menemukan beberapa hal yang diantaranya dengan melakukan evaluasi sistem pemungutan yang berpindah dari sistem manual menuju sistem

online, perubahan sistem ini tak luput dari kendala baik yang datang dari internal maupun dari eksternal. Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) di Kota Padang yang baru diaktifkan merupakan salah satu alternatif DPKA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Namun, sistem yang berjalan belumlah efektif karena banyak hal yang perlu diperhatikan baik dari segi DPKA maupun si Wajib Pajak itu sendiri.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Samudra (2012) mengenai Analisis Efektifitas Sistem Online Dalam Pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta menemukan bahwa dalam analisis teori aktivitas menunjukkan bahwa dalam pemungutan Pajak Hiburan dalam sistem online sudah berjalan dengan efektif. Hambatan yang masih ditemui datang dari pihak ketiga untuk memasang perangkat pendukung sistem online di DKI Jakarta.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kinanti (2014) tentang perbandingan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan sebelum dan setelah diselenggarakannya even Tour de Singkarak. Putri menyebutkan rata-rata pajak yang dihasilkan meningkat setelah penyelenggaraan even ini dan pendapatan pajak tertinggi diperoleh pada tahun 2012.

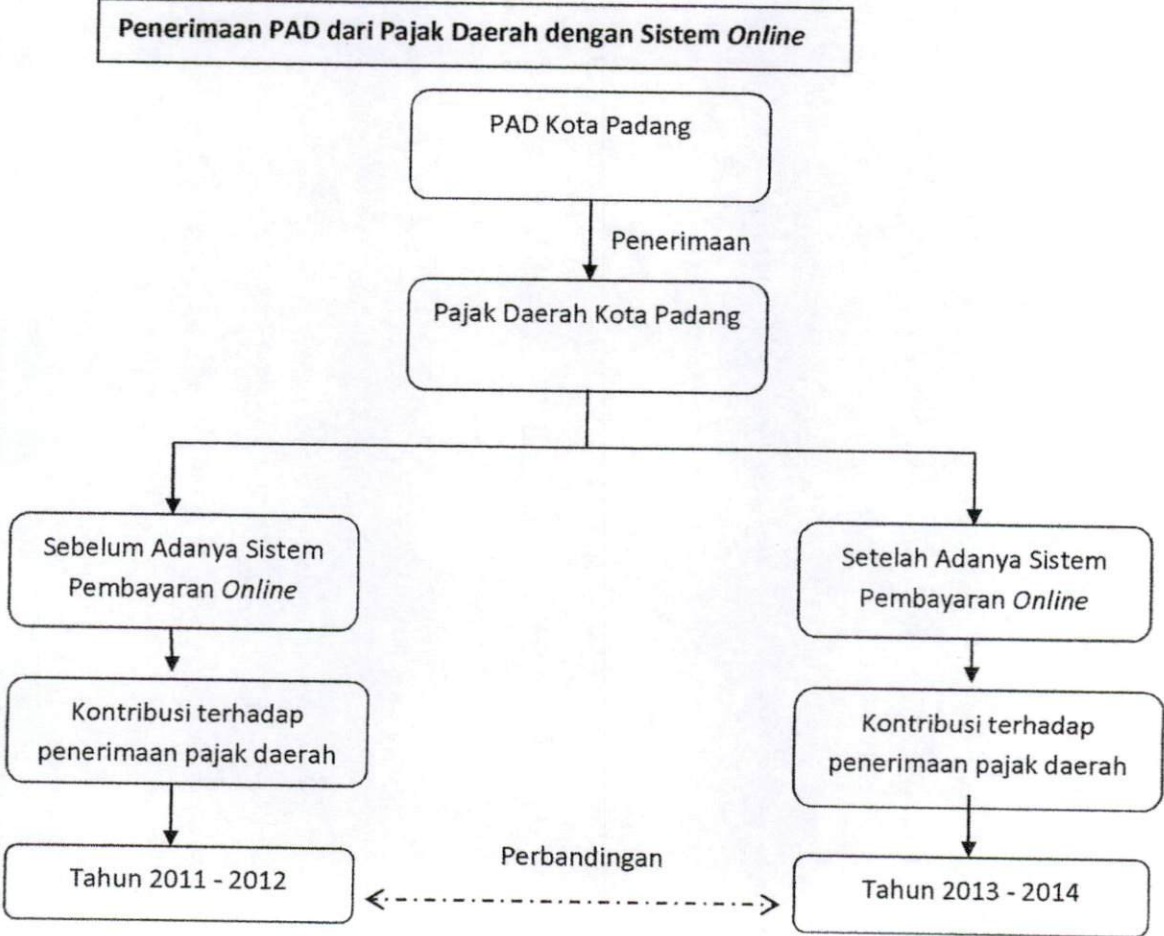
Mentari (2015) dalam Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Setelah dan Sebelum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah juga membandingkan penerimaan PAD Kota Padang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Prima menjelaskan bahwa

Perbandingan penerimaan PAD Kota Padang setelah menjadi pajak daerah menunjukkan hasil yang baik. Karena penerimaan PAD terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011, yaitu tahun dimana BPHTB pertama kali menjadi pajak daerah. Dan pada tahun 2013, PAD juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun tidak setinggi tahun 2011. Hal ini mungkin dikarenakan telah mulai berlaku efektifnya PBB-P2 sebagai pajak daerah.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir untuk penelitian ini adalah :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.8 Pengembangan Hipotesis

Hipotesa atau hipotesis adalah suatu jawaban dugaan, anggapan besar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar. Dugaan sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya dan tentu kebenaran tersebut akan didapatkan setelah penelitian ini selesai dilakukan.

Pada Penelitian ini peneliti hanya meneliti delapan dari sebelas macam Pajak Daerah yang ada. Hal itu disebabkan tiga macam pajak lainnya tidak dapat dibandingkan. Pajak Daerah yang tidak dimasukan dalam penelitian ini adalah Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Reklame tidak diteliti karena pembayarannya masih dilakukan secara manual. Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak diteliti karena kedua pajak tersebut belum dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Padang pada tahun penilitan yang peniliti lakukan.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- H0 : Tidak terdapat perbedaan kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah sebelum dan sesudah pembayaran pajak secara *online*.
- H1 : Terdapat perbedaan kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah sebelum dan sesudah pembayaran pajak secara *online*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Peneliti juga akan melakukan penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. (Sugiyono, 2012:7)

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak *online* dan *offline* sebagai variabel bebas (independent variable). Sedangkan yang merupakan variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2014.

3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data bisa diperoleh dari sumber data primer atau sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sakaran, 2011:60). Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer secara khusus diperoleh dengan cara wawancara dan tanya jawab langsung dengan pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang dan Wajib Pajak yang membayar pajak terutangnya secara online.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang peneliti peroleh dari buku, artikel, perda, dll. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2011 - 2014
2. Data Target dan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011 – 2014

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini antara lain :

1. Metode Penilaian Kepustakaan

Yaitu dengan mengumpulkan segala literature yang berhubungan dengan penelitian termasuk peraturan dan UU Pajak yang berlaku serta jurnal-jurnal terkait.

2. Metode wawancara

Metode ini mengumpulkan informasi mengenai data dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yang mempunyai pengetahuan mengenai penelitian ini, seperti Kepala Bidang Pendapatan DPKA Kota Padang dan pengguna pajak online.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi ini diperoleh melalui dokumen yang memuat target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh penerimaan Pajak Daerah yang didalam penelitian ini adalah Pajak Daerah Kota Padang terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Kontribusi Pajak Daerah ini dibagi menjadi kontribusi dengan sistem manual dan *online*. Dengan menggunakan analisis ini, maka nantinya akan diketahui kontribusi yang diberikan oleh pembayaran Pajak Daerah secara *online* terhadap penerimaan PAD Kota Padang. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Total Pendapatan Pajak daerah}}{\text{Total Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan analisis ini kita dapat membandingkan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang. Dengan Membandingkan analisis tersebut dari tahun 2011-2014 yaitu dari tahun sebelum dan setelah digunakannya pajak *online* untuk membayar pajak daerah dapat diketahui seberapa besar Pajak Daerah dalam menyalang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang, digunakan kriteria sebagai berikut :

Persentase	Kriteria
$\geq 0,00\% - 10,10\%$	Sangat Kurang
$\square 10,10\% - 20,10\%$	Kurang
$\square 20,10\% - 30,10\%$	Sedang
$\square 30,10\% - 40,10\%$	Cukup Baik
$\square 40,10\% - 50\%$	Baik
$\square 50\%$	Sangat Baik

Sumber: Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Depdagri, Kemendagri
Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

3.4.2 Uji T-Test

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan uji statistik *Paired T-Test*, dengan syarat data berdistribusi normal. Normalitas data diuji dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Distribusi data dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data dalam distribusi normal.

2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.

Sedangkan interpretasi hasil uji statistik *Paired T-Test* adalah sebagai berikut :

1. Jika $p \text{ value} \leq 0,01$ maka hasil uji dikatakan sangat signifikan
2. Jika $p \text{ value} > 0,01$ tetapi $\leq 0,05$ maka hasil uji dikatakan signifikan
3. Jika $p \text{ value} > 0,05$ maka hasil uji dikatakan tidak signifikan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Online di Kota Padang

4.1.1 Pajak Online di Kota Padang

Pajak Online merupakan salah satu sistem pembayaran Pajak Daerah yang pada tahun 2013 secara resmi digunakan oleh Pemerintah Kota Padang. Sistem online yang diterapkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengganti seluruh pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan secara manual agar Pemerintah Kota Padang dapat mengontrol seluruh pembayaran pajak dengan lebih mudah.

Sistem manual yang telah diganti oleh pemerintah Kota Padang dianggap tidak lagi efektif dengan semakin bertambahnya Wajib Pajak daerah. Sistem manual memerlukan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem *online*. Hal itu mendorong DPKA Kota Padang untuk menggunakan sistem online agar memperkecil biaya dari pemungutan pajak yang dikeluarkan dan juga mempermudah DPKA Kota Padang melakukan pengarsipan setiap dokumen Wajib Pajak. Waktu transaksi yang lebih cepat dan efisien juga dijadikan alasan DPKA Kota Padang melakukan pergantian sistem pembayaran manual menjadi sistem online.

Sistem *online* juga memperkecil resiko kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh petugas pajak. Wajib Pajak mengisi dan melaporkan sendiri pajak terutanganya, sehingga hal ini mengharuskan Wajib Pajak paham dalam mengoperasikan sistem *online* ini dan mempunyai koneksi internet yang memadai.

Terdapat sebelas macam Pajak Daerah yang dapat dibayarkan secara online. Namun, sampai saat sekarang ini hanya terdapat sepuluh item Pajak Daerah yang dalam prakteknya dapat dibayarkan secara online, yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari sepuluh item pajak diatas, hanya Pajak Reklame yang masih dibayarkan secara manual, sehingga pengaplikasian pajak online yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang belum semuanya berjalan sesuai dengan rencana.

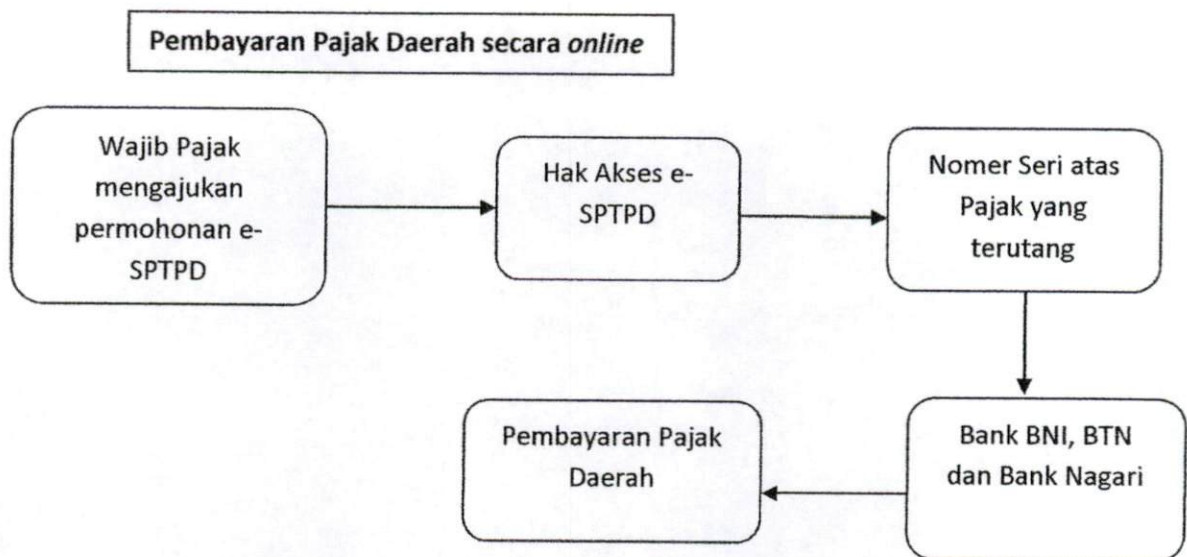
Pada pembayaran pajak secara online, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti memiliki e-SPTPD. SPTPD merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak dan / atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan e-SPTPD adalah sistem aplikasi pembayaran dan pelaporan pajak daerah berbasis teknologi informasi.

Permohonan pembuatan e-SPTPD harus diajukan kepada petugas pelayanan pajak online untuk mendapat izin akses. Setelah wajib pajak mendapatkan izin akses untuk e-SPTPD, barulah wajib pajak dapat mendapatkan akses online untuk membayar pajak dengan memasukan data secara benar dan nantinya akan mendapatkan lembaran atau *file* yang berisi nomer seri dan jumlah pajak terutang jika pajak tersebut dipungut berdasarkan *official assessment system*. Nomer seri tersebut digunakan untuk membayar pajak terutang dari wajib pajak pada tahun atau bulan tersebut. Setelah itu wajib pajak dapat melunasi pajak terutangnya di bank-bank yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang yaitu pada bank BNI, Bank Nagari dan BTN. Pemerintah Kota Padang juga akan melakukan kerjasama dengan bank-bank lainnya demi mendukung kegiatan pembayaran pajak secara online ini. Untuk tahun ini pemerintah sudah melakukan pertimbangan kerjasama dengan Bank BRI yang akan dijadikan salah satu bank yang akan memiliki fasilitas pembayaran Pajak Daerah secara online.

Pajak Daerah di Kota Padang juga menerapkan sistem pemungutan *self assessment system* untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Sembilan pajak lainnya menggunakan sistem pemungutan berupa *official assessment system* dimana fiskus lah yang menghitung pajak terutang si wajib pajak sehingga dalam nomer seri yang didapatkan oleh wajib pajak dalam mengakses e-SPTPD juga terlampir pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak yang telah dihitung oleh pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat diilustrasikan alur pembayaran pajak secara online sebagai berikut :

Gambar 4.1 Alur Pembayaran Pajak Daerah secara online



4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang merupakan penggabungan Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan Sub Bagian Aset pada Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Padang. Pembentukan DPKA Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kepada Peraturan Walikota

Padang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset.

1. Visi dan Misi DPKA

Visi DPKA adalah “terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka DPKA menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan aset melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya aparatur
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan daerah
- c. Meningkatkan koordinasi dengan stake holders dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBD.
- d. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang profesional dan berkelanjutan
- e. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi DPKA

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset. Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, DPKA memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - b. Penyiapan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda
 - d. Pengelolaan akuntansi keuangan daerah
 - e. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
 - f. Menyiapkan laporan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah
 - g. Pelaksanaan kegiatan penilaian aset daerah, kebijakan penghapusan aset daerah
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan
3. Struktur Organisasi DPKA

DPKA dipimpin oleh seorang kepala. Kepala ini membawahi langsung sekretaris dan beberapa bidang. Berikut penjelasan mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsinya menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala DPKA membawahi langsung sekretaris dan beberapa bidang.

b. Sekretariat,

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan DPKA. Sekretariat bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bag. Keuangan
3. Sub. Bag. Aplikasi Sistem Informasi

c. Bidang Pendapatan

Mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah. Kepala Bidang Pendapatan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang pendapatan terdiri dari:

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
2. Seksi Penetapan
3. Seksi Penagihan

d. Bidang Pengendalian

Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang pengendalian mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan tugas di bidang pengendalian.

Bidang ini terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
2. Seksi Pengawasan
3. Seksi Pengurangan dan Keberatan

e. Bidang Anggaran

Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang ini mempunyai tugas membantu kepala dinas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan perubahan APBD. Bidang ini terdiri dari:

1. Seksi Anggaran Belanja Langsung
2. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
3. Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran

f. Bidang Aset

Mempunyai tugas membantu kepala dinas mempersiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah. Bidang aset dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang aset terdiri dari:

1. Seksi Pengamanan Aset
2. Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Aset
3. Seksi Penatausahaan Aset

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan pelaporan serta mempersiapkan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang ini terdiri dari:

1. Seksi Akuntansi
2. Seksi Pelaporan

h. Bidang Perbendaharaan

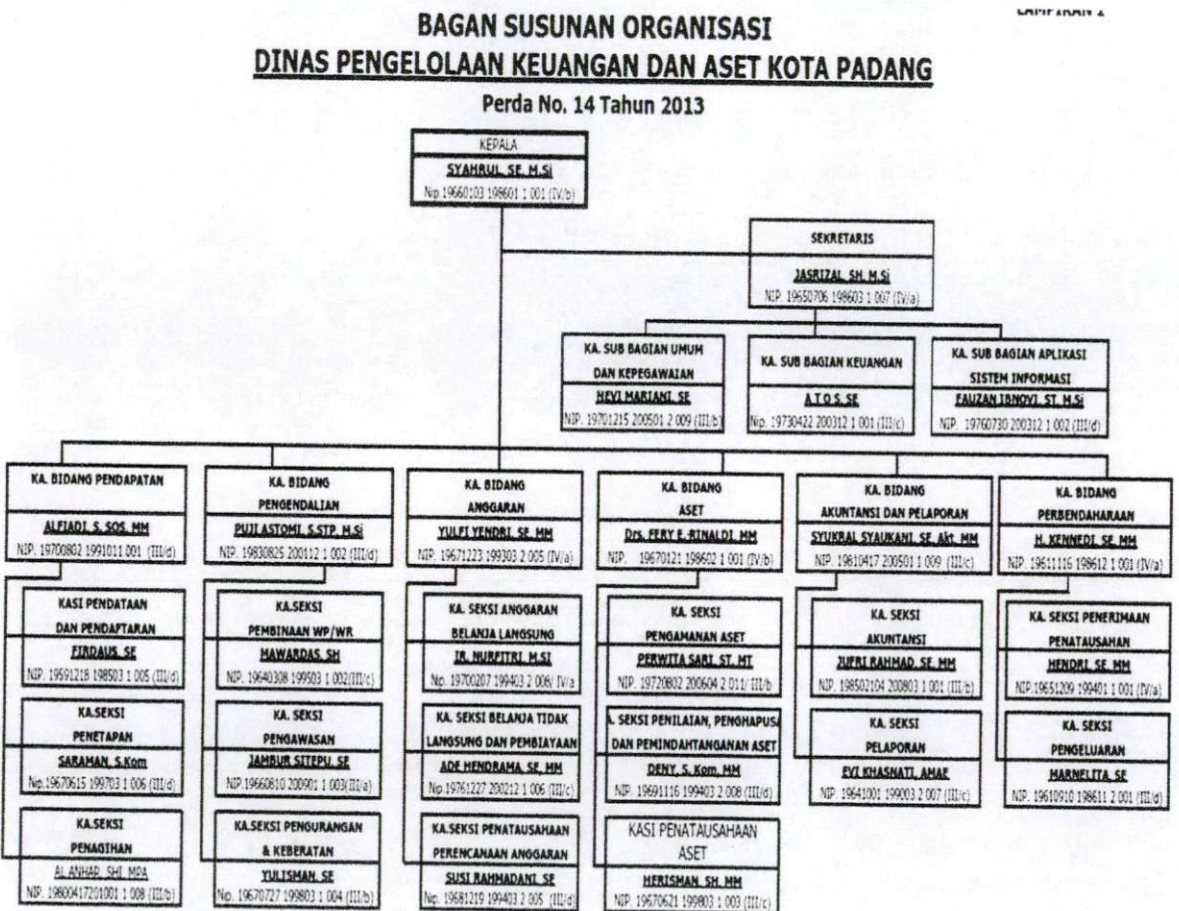
Mempunyai tugas menyusun program, merumuskan kebijakan teknis perbendaharaan, melaksanakan tata laksana keuangan dengan cara merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, dan verifikasi, serta penerimaan laporan keuangan. Bidang ini terdiri dari:

1. Seksi Penerimaan dan Penatausahaan
2. Seksi Pengeluaran

4.1.3 Struktur Organisasi DPKA Kota Padang

Struktur organisasi DPKA Kota Padang sesuai dengan Perda No.14 tahun 2013 sebagai berikut :

Gambar 4.2 Struktur organisasi DPKA Kota Padang



4.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Sebelum Pembayaran Pajak Daerah Secara Online

Analisis kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang sebelum adanya pembayaran pajak secara online digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh dari pendapatan pajak daerah saat dibayar secara *offline* atau manual terhadap total penerimaan PAD kota padang. Semakin tinggi rasio kontribusi Pajak Daerah maka semakin berperanguh terhadap penerimaan PAD.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab III, maka rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Total Pendapatan Pajak daerah}}{\text{Total Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sedangkan rasio atau skala yang digunakan untuk mengukur kontribusi tersebut adalah sebagai berikut :

Persentase	Kriteria
$\geq 0,00\% - 10,10\%$	Sangat Kurang
$\geq 10,10\% - 20,10\%$	Kurang
$\geq 20,10\% - 30,10\%$	Sedang
$\geq 30,10\% - 40,10\%$	Cukup Baik
$\geq 40,10\% - 50\%$	Baik
$> 50\%$	Sangat Baik

Berikut adalah perhitungan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang Sebelum pembayaran pajak secara online (2011 – 2012):

Tabel 4.1
Tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang Sebelum
pembayaran pajak secara online tahun 2011

JENIS PAJAK	2011			
	REALIASI PAJAK DAERAH (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	KONTRI BUSI	KRITERIA
PAJAK HOTEL	7.910.983.109	150.151.686.567	5,27%	SANGAT KURANG
PAJAK RESTORAN	10.574.382.364	150.151.686.567	7,04%	SANGAT KURANG
PAJAK HIBURAN	1.167.551.077	150.151.686.567	0,78%	SANGAT KURANG
PPJ	42.281.804.495	150.151.686.567	28,16%	SEDANG
PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C	21.495.483.620	150.151.686.567	14,32%	KURANG
PAJAK PARKIR	125.707.688	150.151.686.567	0,08%	SANGAT KURANG
PAJAK AIR BAWAH TANAH	205.419.439	150.151.686.567	0,14%	SANGAT KURANG
BPHTB	14.748.363.377	150.151.686.567	9,82%	SANGAT KURANG
RATA-RATA	98.509.695.169	1.201.213.492.536	8,20%	SANGAT KURANG

Sumber: DPKA Kota Padang.

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah pada tahun 2011 terhadap PAD Kota Padang. Pada tahun 2011 Pajak Daerah masih dipungut secara *offline* atau manual. Tahun 2011 rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD adalah sebesar 8,20%. Hal ini merupakan rata-rata dari 8 item pajak daerah yang diteliti. Dari hasil yang telah diperoleh Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 28,16% dari total PAD yang diperoleh pada tahun 2011 dengan kriteria kontribusi sedang.

Tujuh item pajak lainnya yaitu Pajak Hotel memberikan kontribusi sebesar 5,27% terhadap pendapatan PAD, Pajak Restoran sebesar 7,04%, Pajak Hiburan sebesar 0,78%, Pajak Bahan Galian Golongan C sebesar 14,32%, Pajak Parkir sebesar 0,08%, Pajak Air Bawah Tanah sebesar 0,14 dan BPHTP menyumbang sebesar 9,82% dari total pendapatan PAD Kota Padang pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, hanya terdapat Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bahan Galian Golongan C yang mempunyai kontribusi lebih dari 10% terhadap PAD kota padang dengan sistem pembayaran secara manual. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang pada tahun 2011 adalah 8,20% dengan kriteria kontribusi sangat kurang.

Tabel 4.2
Tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang Sebelum pembayaran pajak secara online tahun 2012

JENIS PAJAK	2012			
	REALIASI PAJAK DAERAH (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	KONTRIB USI	KRITERIA
PAJAK HOTEL	14.462.683.262	189.450.840.075	7,63%	SANGAT KURANG
PAJAK RESTORAN	13.167.100.651	189.450.840.075	6,95%	SANGAT KURANG
PAJAK HIBURAN	1.028.070.266	189.450.840.075	0,54%	SANGAT KURANG
PPJ	53.803.663.531	189.450.840.075	28,40%	SEDANG
PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C	25.803.434.624	189.450.840.075	13,62%	KURANG
PAJAK PARKIR	225.211.201	189.450.840.075	0,12%	SANGAT KURANG
PAJAK AIR BAWAH TANAH	241.333.667	189.450.840.075	0,13%	SANGAT KURANG
BPHTB	16.278.576.465	189.450.840.075	8,59%	SANGAT KURANG
RATA-RATA	125.010.073.667	1.515.606.720.600	8,25%	SANGAT KURANG

Sumber: DPKA Kota Padang.

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah pada tahun 2012 terhadap PAD Kota Padang. Tahun 2012 merupakan tahun terakhir wajib pajak membayar pajak terutangnya secara manual. Pada tahun ini Pemerintah Kota Padang sudah mulai merencanakan pemindahan sistem dari pembayaran manual menjadi pembayaran secara online. Pada tahun 2012 Pajak Penerangan Jalan (PPJ) masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan PAD Kota Padang tahun 2012 yaitu sebesar 28,40%.

Kontribusi Pajak Daerah meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari kontribusi dari ketujuh item pajak lainnya yaitu Pajak Hotel berkontribusi sebesar 7,63%, Pajak Restoran sebesar 6,95%, Pajak Hiburan sebesar 0,54%, Pajak Bahan Galian Golongan C sebesar 13,62%, Pajak Parkir sebesar 0,12%, Pajak Air Tanah sebesar 0,13% dan BPHTB berkontribusi sebesar 8,59%.

Dari kedelapan item pajak yang telah dihitung, terdapat beberapa item Pajak Daerah yang mengalami peningkatan dalam pendapatan dan kontribusinya maupun penurunan. Namun, secara keseluruhan rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang meningkat dari tahun lalu sebesar 0,05% dengan total 8,25%. Walaupun hanya meningkat tipis dari tahun sebelumnya, hal tersebut merupakan sebuah sinyal positif yang dapat dijadikan acuan pendapatan Pajak Daerah ditahun berikutnya setelah digunakannya sistem pembayaran secara online.

4.3 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Setelah Pembayaran Pajak Daerah Secara Online

Analisis kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang setelah adanya pembayaran pajak secara online digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh dari pendapatan pajak daerah saat dibayar secara online terhadap total penerimaan PAD kota padang. Semakin tinggi rasio kontribusi Pajak Daerah maka semakin berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab III, maka rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Total Pendapatan Pajak daerah}}{\text{Total Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sedangkan rasio atau skala yang digunakan untuk mengukur kontribusi tersebut adalah sebagai berikut :

Persentase	Kriteria
$\geq 0,00\% - 10,10\%$	Sangat Kurang
$\geq 10,10\% - 20,10\%$	Kurang
$\geq 20,10\% - 30,10\%$	Sedang
$\geq 30,10\% - 40,10\%$	Cukup Baik
$\geq 40,10\% - 50\%$	Baik
$> 50\%$	Sangat Baik

Berikut adalah perhitungan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang Setelah pembayaran pajak secara online tahun 2013 :

Tabel 4.3
Tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang Setelah pembayaran pajak secara online tahun 2013

JENIS PAJAK	2013			
	REALIASI PAJAK DAERAH (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	KONTRIB USI	KRITERIA
PAJAK HOTEL	17.667.533.678	238.871.896.576	7,40%	SANGAT KURANG
PAJAK RESTORAN	15.444.114.983	238.871.896.576	6,47%	SANGAT KURANG
PAJAK HIBURAN	2.072.063.492	238.871.896.576	0,87%	SANGAT KURANG
PPJ	58.069.722.492	238.871.896.576	24,31%	SEDANG
PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C	29.411.778.038	238.871.896.576	12,31%	KURANG
PAJAK PARKIR	266.722.600	238.871.896.576	0,11%	SANGAT KURANG
PAJAK AIR BAWAH TANAH	335.586.502	238.871.896.576	0,14%	SANGAT KURANG
BPHTB	15.859.789.435	238.871.896.576	6,64%	SANGAT KURANG
RATA-RATA	139.127.311.220	1.910.975.172.608	7,28%	SANGAT KURANG

Sumber: DPKA Kota Padang.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun pertama pengaplikasian pajak online sebagai sistem pembayaran pajak yang baru belum berjalan dengan maksimal. Terlihat dari turunnya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang pada tahun 2013. Tahun 2013 mungkin bisa dianggap sebagai uji coba dari penggunaan sistem pembayaran pajak yang baru. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) masih menjadi pajak yang paling berkontribusi dalam penerimaan PAD Kota Padang. PPJ berkontribusi sebesar 24,31% menurun dari tahun-tahun sebelumnya sebesar kurang lebih 3% dari penerimaan sebelumnya.

Ketujuh item pajak lainnya juga mengalami keadaan yang hampir serupa. Seperti kontribusi Pajak Hotel menurun dari 7,63% menjadi 7,40%, Pajak Restoran dari 6,95% menjadi 6,47%, Pajak Bahan Galian Golongan C menurun dari 13,62% menjadi 12,31, Pajak Parkir dari 0,12% menjadi 0,11% dan BPHTB menurun dari 8,59% menjadi 6,64%. Namun, tidak semua item pajak mengalami penurunan angka kontribusi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Pajak Hiburan yang meningkat dari 0,54% menjadi 0,87% dan Pajak Air Bawah Tanah dari 0,13% menjadi 0,14%.

Harapan atas kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD meningkat dari tahun sebelumnya setelah mengubah sistem pembayaran menjadi online belumlah berjalan sesuai dengan rencana. Rata-rata kontribusi yang diperoleh dari pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar 7,28% per pajak daerah dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Walaupun rata-rata kontribusi tidak berbeda cukup jauh dari tahun sebelumnya, namun dengan menurunnya total kontribusi dari tahun lalu menjadi tanda tanya tentang bagaimana efektifitas dan efisiensi sistem pembayaran online.

Berikut adalah perhitungan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang Setelah pembayaran pajak secara online tahun 2014 :

Tabel 4.4
Tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota
Padang Setelah pembayaran pajak secara online tahun
2014

JENIS PAJAK	2014			
	REALIASI PAJAK DAERAH (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	KONTRIB USI	KRITERIA
PAJAK HOTEL	21.353.910.003	316.079.336.434,44	6,76%	SANGAT KURANG
PAJAK RESTORAN	17.807.676.805	316.079.336.434,44	5,63%	SANGAT KURANG
PAJAK HIBURAN	2.480.690.616	316.079.336.434,44	0,78%	SANGAT KURANG
PPJ	72.811.342.272	316.079.336.434,44	23,04%	SEDANG
PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C	36.041.205.389	316.079.336.434,44	11,40%	KURANG
PAJAK PARKIR	443.130.570	316.079.336.434,44	0,14%	SANGAT KURANG
PAJAK AIR BAWAH TANAH	367.039.066	316.079.336.434,44	0,12%	SANGAT KURANG
BPHTB	15.713.702.123	316.079.336.434,44	4,97%	SANGAT KURANG
RATA-RATA	167.018.696.844	2.528.634.691.475,52	6,61%	SANGAT KURANG

Sumber: DPKA Kota Padang.

Begitupun dengan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD pada tahun 2014. Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD semakin menurun. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) masih menjadi penyumbang kontribusi terbesar pada tahun 2014. Pajak ini berkontribusi sebesar 23,04% walaupun merupakan kontribusi terendah dari tahun-tahun sebelumnya.

Serupa dengan Pajak Daerah lainnya juga mengalami penurunan angka kontribusi terhadap penerimaan PAD. Terkecuali Pajak Parkir yang mengalami peningkatan sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya. Pajak Hotel mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,64%, Pajak Restoran menurun sebesar 0,83%, Pajak Hiburan menurun sebesar 0,08% menjadi 0,78%, Pajak Bahan Galian Golongan C menurun menjadi 11,40%, Pajak Air Bawah Tanah menurun sebesar 0,02% dan BPHTB menurun sebesar 1,67%.

Hampir semua Pajak Daerah mengalami penurunan kontribusi terhadap penerimaan PAD Kota Padang pada tahun 2014. Tahun 2014 merupakan tahun kedua pengaplikasian sistem pembayaran online dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. Kontribusi yang diterima dari Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD adalah yang paling rendah dari 3 tahun terakhir. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD adalah 6,61% per pajak daerah dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Rata-rata kontribusi menurun 0,68% dari tahun 2013 dan menurun 1,64% dari tahun 2012 yaitu sebelum pembayaran pajak secara online diaplikasikan oleh Pemerintah Kota Padang.

Dari hasil yang telah diperoleh, dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan dari pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang semakin menurun dari tahun ke tahun. Sebelumnya dengan menggunakan sistem *offline* atau sistem manual, kontribusi yang diberikan Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang mempunyai rata-rata kontribusi yang cenderung stabil dan meningkat dari tahun ke tahun. Setelah pemerintah mengganti sistem pembayaran menjadi online, terjadi penurunan rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Daerah terhadap PAD

Kota Padang dengan angka kontribusi kurang dari 8% dan menurun lagi ditahun berikutnya.

Banyak hal yang menyebabkan turunnya kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang. Hal ini tak luput dari kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dan juga Wajib Pajak yang belum mengetahui cara dan prosedur pembayaran pajak secara *online*. Sosialisasi mengenai pajak online juga masih kurang dilakukan oleh pemerintah. Ketersedian akses internet juga menjadi kendala dalam pembayaran pajak secara *online* ini. Wajib Pajak yang tidak memiliki akses internet akan kesusahan untuk melunasi pajak terutang.

Susilowati (2013) mengatakan bahwa fiskus dan wajib pajak belum terlalu siap dengan sistem baru pembayaran pajak ini. Namun, fiskus sudah terlebih dahulu melakukan persiapan seperti melakukan pelatihan-pelatihan mengenai sistem online ini.

Menurunnya kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD Kota Padang dapat dijadikan alat sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan pajak *online* itu sendiri. Dukungan dan kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak sangat membantu pemerintah dalam menjalankan sistem ini dengan lebih baik lagi dari sebelumnya.

4.4 Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan PAD Sebelum dan Sesudah Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online*

Analisis perbandingan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD sebelum dan sesudah pembayaran pajak daerah secara online merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan dari kontribusi Pajak

Daerah terhadap penerimaan PAD Kota Padang saat sebelum dan saat sesudah pembayaran pajak daerah secara online diterapkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab III, analisis ini dilakukan dengan melakukan uji statistik perbandingan yaitu dengan uji Paired T-Test. Paired sample T-Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda. Uji ini dilakukan dengan syarat data berdistribusi normal dan diuji dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Distribusi data dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data dalam distribusi normal.
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.

Sedangkan interpretasi hasil uji statistik *Paired T-Test* adalah sebagai berikut :

1. Jika $p \text{ value} \leq 0,01$ maka hasil uji dikatakan sangat signifikan
2. Jika $p \text{ value} > 0,01$ tetapi $\leq 0,05$ maka hasil uji dikatakan signifikan
3. Jika $p \text{ value} > 0,05$ maka hasil uji dikatakan tidak signifikan

Tabel 4.5
Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		pajakmanual	Pajakonline
N		16	16
Normal Parameters ^a	Mean	8.2244	6.9431
	Std. Deviation	9.17569	7.64303
Most Extreme Differences	Absolute	.187	.226
	Positive	.181	.226
	Negative	-.187	-.186
Kolmogorov-Smirnov Z		.750	.905
Asymp. Sig. (2-tailed)		.628	.386
a. Test distribution is Normal.			

Dari hasil diatas dapat kita lihat bahwa data berdistribusi dengan normal. Variabel yang diuji yaitu pajak online dan pajak manual menunjukan angka signifikansi besar dari 0,05. Hasil uji statistik menunjukan untuk pajak manual memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,628. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sesuai dengan kriteria normalnya distribusi data. Hal ini dapat dikatakan bahwa data pajak manual dapat dilakukan uji Paired T-Test untuk analisis selanjutnya.

Pajak online juga menunjukan distribusi data yang normal. Hal ini ditunjukan dari hasil uji statistik yang menunjukan pajak online memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,386. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sebagai standar normalnya distribusi suatu data. Normalnya distribusi dari kedua variabel yang

diuji dapat disimpulkan bahwa data yang akan diuji dengan Paired T-Test dapat dilakukan karena data berdistribusi dengan normal.

Tabel 4.6
Uji Paired T-Test
Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 pajakmanual	8.2244	16	9.17569	2.29392
Pajakonline	6.9431	16	7.64303	1.91076

Dari hasil uji statistik diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan PAD Kota Padang. Pada saat sistem penerimaan masih menggunakan sistem manual rata-rata kontribusi adalah sebesar 8,22 sedangkan setelah menggunakan sistem pembayaran secara online menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 6,94. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pembayaran masih dilakukan secara manual, kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap PAD lebih besar dibandingkan saat sistem pembayaran menjadi *online*.

Tabel 4.7
Uji Paired T-Test
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 pajakmanual & pajakonline	16	.990	.000

Dari uji diatas memperlihatkan apakah ada hubungan rata-rata dari pajak manual dan online. Dari hasil yang diperoleh terdapat hubungan yang signifikan dari kontribusi pajak daerah sebelum dan sesudah adanya pembayaran pajak secara online. Korelasi antara rata-rata korelasi pajak manual dan online sangatlah kuat dengan nilai kolerasi 0,990 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukan adanya kolerasi yang kuat antara kontribusi pajak daerah sebelum dan sesudah adanya pembayaran secara *online*.

Tabel 4.8
Uji Paired T-Test
Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
Pair 1	pajakmanual - pajakonline	128.125	194.765	.48691	.24342	231.908	2.631	15	.019

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang dengan menggunakan pajak manual dan pajak online memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari angka signifikansi sebesar 0,019 yang besar dari 0,01 dan kecil atau sama dengan 0,05. Hasil ini dapat dikatakan bahwa ternyata memang terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel.

Perbedaannya dapat kita cocokkan dengan hasil kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang yang dilakukan dengan menghitung secara manual. Kontribusi pajak daerah yang dihitung secara manual mendapatkan angka kontribusi yang cukup baik pada saat sistem pembayaran masih dilakukan secara

manual. Angka kontribusi berbeda cukup jauh dibandingkan saat pemerintah mengganti sistem menjadi online. Penurunan kontribusi ini juga dapat dilihat dari rata-rata kontribusi pada tabel 4.6.

4.5 Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD Kota Padang semakin menurun. Hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa saat menggunakan sistem manual rata-rata kontribusi yang diberikan pajak daerah sebesar lebih dari 8% per pajak daerah setiap tahunnya. Sedangkan saat pemerintah mengganti sistem pembayaran menjadi *online*, rata-rata kontribusi yang diberikan per pajak daerah malah menurun menjadi kurang dari 8% dan menurun lagi ditahun berikutnya.

Sistem *online* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak ternyata malah mengurangi kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD. Awalnya sistem online ini dimaksudkan untuk menambah pendapatan pemerintah dan membantu wajib pajak agak tidak lagi kesusahan dalam melunasi pajak terutanganya. Pajak yang dibayarkan secara online juga dinilai lebih praktis dan hemat biaya. Selain itu waktu yang lebih singkat dan efisien juga dinilai mampu untuk meningkatkan antusiasme masyarakat yang memiliki jadwal yang padat.

Pada kenyataannya sistem online belumlah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan pemerintah. Akses internet yang tidak dimiliki oleh semua masyarakat menjadi salah satu penghambat sistem ini. Minimnya sosialisasi juga merupakan salah satu penghambat jalanya sistem pembayaran pajak online itu sendiri.

Dari hasil uji statistik memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan saat pembayaran masih dilakukan secara manual dan saat pembayaran dilakukan secara online. Susilowati (2013) mengatakan bahwa kesiapan masyarakat dan petugas pajak dinilai masih belum maksimal. Walaupun wajib pajak tahu mengenai sistem online ini tetapi ada yang dari mereka tidak bisa melakukan input data karena kurangnya pengetahuan mengenai internet. Kasus ini banyak terjadi kepada wajib pajak lansia yang kurang mengerti dalam menggunakan internet.

Sehingga dari hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang semakin menurun saat menggunakan sistem online dan ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengelola sistem pembayaran pajak online ini dengan lebih baik lagi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak *online* merupakan sistem pembayaran Pajak Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang pada tahun 2013 hingga saat ini. Pada sistem online ini, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti memiliki e-SPTPD, setelah itu Wajib Pajak mempunyai hak akses dan dapat memasukan data dengan benar. Setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut Wajib Pajak akan mendapatkan *file* yang berisikan jumlah pajak terutang. Wajib Pajak dapat melunasi pajak terhutanganya di bank-bank yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.
2. Rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD Kota Padang sebelum pembayaran secara online cukup stabil. Nilai kontribusi menunjukan angka 8,20% dan 8,25% per pajak daerah dengan kriteria kontribusi sangat kurang.
3. Rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD Kota Padang sesudah pembayaran secara online menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata kontribusi menunjukan angka 7,28% dan 6,61% per pajak daerah dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Walaupun kriteria kontribusi sama dengan tahun-tahun sebelumnya, namun rata-rata kontribusi yang diberikan menurun dari sebelum adanya sistem

pembayaran online. Rata-rata kontribusi menurun hingga 1,64% dari tahun-tahun sebelumnya.

4. Perbandingan saat pembayaran dilakukan secara manual dan saat dilakukan secara *online* adalah signifikan. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,019 dimana lebih besar dari 0,01 atau kurang atau sama dengan 0,05. Hal ini juga dapat dilihat dari perhitungan kontribusi yang dilakukan. Rata-rata kontribusi menurun cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,64%. Angka ini tergolong angka yang cukup besar, sehingga kontribusi yang semakin menurun dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki sistem pembayaran online ini menjadi lebih baik lagi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dilakukan di satu wilayah, yaitu Kota Padang, sehingga kurang mewakili gambaran tingkat kontribusi penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan yang ada di Provinsi Sumatera Barat
2. Penelitian ini hanya menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang selama empat tahun yaitu 2011-2014, hal ini dikarenakan keterbatasan data yang tersedia.
3. Penelitian ini bersifat kuantitatif sehingga fenomena yang bersifat kualitatif belum dapat di telusuri secara jauh melalui penelitian ini.

4. Penelitian ini tidak menguji semua item Pajak Daerah yang ada. Hal ini dikarenakan masih adanya Pajak Daerah yang dibayar secara manual dan keterbatasan data yang tersedia.
5. Penelitian ini belum bisa mengungkapkan semua faktor yang mempengaruhi kinerja pembayaran Pajak Daerah secara *online* di Kota Padang.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai perbandingan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang sebelum dan sesudah adanya sistem pembayaran online ini, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti tahun-tahun selanjutnya mengenai kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang untuk melihat perkembangan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem online.
2. Penelitian selanjutnya dapat menguji pengaruh sistem online terhadap efektifitas, efisiensi dan potensi Pajak Daerah Kota Padang.
3. Penelitian selanjutnya dapat meneliti kontribusi Pajak Provinsi yang memiliki skala yang lebih besar sebagai objek penelitian.
4. Penelitian selanjutnya disarankan meneliti seluruh item Pajak Daerah yang ada, sehingga hasil penelitian dapat dilakukan dengan lebih detail.

5.4 Implentasi Hasil Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Padang

Pemerintah Kota Padang sebaiknya melakukan upaya untuk lebih memperbaiki sistem online agar dapat beroperasi semakin baik lagi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan mudah dan efisiennya pembayaran pajak secara online. Pemerintah Kota Padang sebaiknya juga membuka area internet gratis yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melunasi pajak terutangnya.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak, sebaiknya dapat menambah pengetahuan akan sistem *online* seperti penggunaan internet dan tatacara pembayaran dan pelaporan SPT secara *online*. Sehingga dengan semakin terlatihnya masyarakat dalam menggunakan internet akan dapat membantu program pemerintah seperti pembayaran pajak secara *online* ini.

REFERENSI

- Antara. *Sistem Pembayaran Pajak Online di Padang*.
<http://m.eksposnews.com/view/5/51522/Sistem-Pembayaran-Pajak-Online-di-Padang.html>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2015. Jam 19:37.
- Budiyowono, Nugroho. 1995. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Edisi Revisi. Jakarta: BPFE UI.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Der. *Pemko Padang Launching Pembayaran Pajak Online*.
<http://www.padangmedia.com/1-Berita/80161-Pemko-Padang-Launching-Pembayaran-Pajak-Online.html>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2015. Jam 21:20.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kinanti, Putri. *Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan Sebelum dan Setelah Diselenggarakannya Event Tour De Singkarak*. Skripsi: Universitas Andalas. 2014.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Mentari, Prima. *Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Setelah dan Sebelum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah*. Skripsi: Universitas Andalas. 2015.
- Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 1996. *Keputusan Menteri dalam Negeri NO. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Sakaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

- Samudra, Dipa. *Analisis Efektifitas Sistem Online Dalam Pemungutan Pajak Hiburan Di Propinsi DKI Jakarta*. Skripsi: Universitas Indonesia. 2012.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, Dwi Amelia. *Analisis dan Evaluasi Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) di Kota Padang*. Skripsi: Universitas Andalas. 2013.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku II*. Jakarta: Salemba Empat.

PERKEMBANGAN PAD KOTA PADANG TAHUN 2007 S/D 2014

NO.	JENIS PAJAK	TAHUN											
		2007			2008			2009			2010		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
I	PAD	102.858.529.149	106.293.854.247	103,34	128.469.134.954	117.866.279.170	91,75	133.164.556.383	113.268.654.183	85,06	120.926.262.740	116.435.656.590	96,29
1	PAJAK DAERAH	66.153.415.530	69.540.855.976	105,12	80.146.337.803	76.795.691.361	95,82	84.834.491.366	71.666.752.249	84,48	75.854.256.630	77.639.340.556	102,35
2	PAJAK HOTEL	5.650.000.000	5.290.680.105	93,64	6.500.000.000	7.582.483.951	116,65	7.500.000.000	6.948.371.260	92,64	5.997.859.500	6.106.355.228	101,81
3	PAJAK RESTORAN	5.700.000.000	5.941.469.847	104,24	8.000.000.000	8.247.380.757	103,09	8.500.000.000	7.596.772.297	89,37	5.771.673.570	6.922.766.148	119,94
4	PAJAK HIBURAN	925.000.000	1.181.811.060	127,76	1.100.000.000	507.731.475	46,16	1.000.000.000	619.875.293	61,99	1.338.223.560	718.116.425	53,66
5	PAJAK REKLAME	3.000.000.000	3.266.373.785	108,88	4.000.000.000	4.171.560.886	104,29	4.000.000.000	3.423.898.310	85,60	4.000.000.000	3.020.545.000	75,51
6	PAJAK PENERANGANNJALAN (PPJ)	29.778.415.530	32.725.482.905	109,90	32.300.000.000	29.917.524.400	92,62	33.226.500.000	30.588.560.470	92,06	37.226.500.000	38.577.494.675	103,63
7	PAJAK BAHAN GALIAN GOL. C	24.000.000.000	21.034.495.974	87,64	22.528.198.000	22.966.916.736	101,95	24.000.000.000	18.405.971.848	76,69	21.500.000.000	22.235.642.880	103,42
8	PAJAK PARKIR	100.000.000	100.542.300	100,54	120.000.000	120.001.703	100,00	134.800.000	102.654.680	76,15	20.000.000	58.420.200	292,10
9	PAJAK AIR BAWAH TANAH												
10	BPHTB												
11	PAJAK SARANG BURUNG WALET												
12	PBB												
II	RETRIBUSI DAERAH	23.797.608.000	21.770.269.103	91,48	30.916.695.824	24.811.993.119	80,25	28.124.113.573	21.898.304.849	77,86	27.066.516.238	21.985.780.440	81,23
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	3.308.614.943	3.308.613.943	100,00	3.788.864.957	3.788.864.957	100,00	4.718.294.398	4.741.733.453	100,50	5.293.729.120	5.293.729.120	100,00
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.598.890.676	11.674.115.225	121,62	13.617.236.370	12.469.729.733	91,57	15.487.657.046	14.961.863.631	96,61	12.711.760.753	11.516.806.474	90,60

NO.	JENIS PAJAK	TAHUN											
		2011			2012			2013			2014		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
I	PAD	164.935.233.893	150.151.686.567	91,04	187.627.806.661	189.450.840.075	100,97	238.889.759.534	238.871.896.576	99,99	307.350.120.985.90	316.079.336.434.44	102,84
1	PAJAK DAERAH	104.137.000.000	102.412.116.200	98,34	118.364.906.000	128.595.100.667	108,64	156.230.000.000	165.460.994.275	105,91	179.240.600.000	194.617.818.528	108,58
2	PAJAK HOTEL	7.600.000.000	7.910.983.109	104,09	12.090.532.000	14.462.683.262	119,62	15.300.000.000	17.667.533.678	115,47	19.865.600.000	21.353.910.003	107,49
3	PAJAK RESTORAN	9.500.000.000	10.574.382.364	111,31	12.278.510.000	13.167.100.651	107,24	13.950.000.000	15.444.114.983	110,71	16.000.000.000	17.807.676.805	111,30
4	PAJAK HIBURAN	1.100.000.000	1.167.551.077	106,14	1.020.864.000	1.028.070.266	100,71	1.500.000.000	2.072.063.492	138,14	2.200.000.000	2.480.690.616	112,76
5	PAJAK REKLAME	3.750.000.000	3.597.016.400	95,92	3.500.000.000	3.578.627.000	102,25	3.700.000.000	3.705.954.000	100,16	3.300.000.000	3.389.971.900	102,73
6	PAJAK PENERANGANNJALAN (PPJ)	42.000.000.000	42.281.804.495	100,67	50.250.000.000	53.803.663.531	107,07	55.750.000.000	58.069.722.492	104,16	65.900.000.000	72.811.342.272	110,49
7	PAJAK BAHAN GALIAN GOL. C	22.900.000.000	21.495.483.620	93,87	23.800.000.000	25.803.434.624	108,42	28.000.000.000	29.411.778.038	105,04	31.800.000.000	36.041.205.389	113,34
8	PAJAK PARKIR	112.000.000	125.707.688	112,24	190.000.000	225.211.201	118,53	230.000.000	266.722.600	115,97	300.000.000	443.130.570	147,71
9	PAJAK AIR BAWAH TANAH	175.000.000	205.419.439	117,38	210.000.000	241.333.667	114,92	275.000.000	335.586.502	122,03	350.000.000	367.039.066	104,87
10	BPHTB	17.000.000.000	14.748.363.377	86,76	15.000.000.000	16.278.576.465	108,52	15.500.000.000	15.859.789.435	102,32	16.000.000.000	15.713.702.123	98,21
11	PAJAK SARANG BURUNG WALET				25.000.000	6.400.000	25,60	25.000.000	1.400.000	5,60	25.000.000	3.000.000	12,00
12	PBB												
II	RETRIBUSI DAERAH	29.525.514.278	23.522.172.085	79,67	37.922.969.019	30.325.980.534	79,97	52.445.617.226	22.626.329.055	43,12	23.500.000.000	24.206.149.784	103,00
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	8.996.686.425	8.996.686.425	100,00	8.403.534.687	8.403.534.687	100,00	8.415.720.596	8.415.720.596	100,00	10.832.007.020	10.832.007.020	100,00
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.276.033.190	15.220.711.857	68,33	22.936.396.955	22.126.224.187	96,47	21.798.421.712	25.585.221.042	117,37	54.981.890.076.90	54.836.038.512.44	99,73

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		pajakmanual	pajakonline
N		16	16
Normal Parameters ^a	Mean	8.2244	6.9431
	Std. Deviation	9.17569	7.64303
Most Extreme Differences	Absolute	.187	.226
	Positive	.181	.226
	Negative	-.187	-.186
Kolmogorov-Smirnov Z		.750	.905
Asymp. Sig. (2-tailed)		.628	.386
a. Test distribution is Normal.			

T-TEST PAIRS=pajakmanual WITH pajakonline (PAIRED)
 /CRITERIA=CI(.9500)
 /MISSING=ANALYSIS.

T-Test

[DataSet0]

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	pajakmanual	8.2244	16	9.17569	2.29392
	pajakonline	6.9431	16	7.64303	1.91076

Paired Samples Correlations

--	--	--	--

Paired Samples Test									
		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	pajakmanual - pajakonline	1.28125	1.94765	.48691	.24342	2.31908	2.631	15	.019

ONEWAY pajakmanual BY pajakonline
/STATISTICS HOMOGENEITY

/MISSING ANALYSIS.

Oneway

[DataSet0]

ANOVA					
pajakmanual					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1262.898	14	90.207	4.510E5	.001
Within Groups	.000	1	.000		
Total	1262.899	15			



PEMERINTAH KOTA PADANG KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Balaikota Padang Jalan By. Pass KM. 18 Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor :070.04.1001 / Kesbang.Pol/2015

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang menerbitkan rekomendasi dengan :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat dari :Kepala FE Unand Padang
Nomor : 911/UN16.5/PP/2015

tanggal 16 April 2015

b. Surat Pernyataan Bertanggung jawab penelitian Ybs,

tanggal 17 April 2015

pada prinsipnya dapat diberikan persetujuan Penelitian/ Survey/ Pemetaan/ PKL/ PBL, Pengalaman Belajar Lapangan di dalam wilayah Kota Padang kepada :

Nama	: Rizki Ramadhan
Tempat/Tanggal Lahir	: Simabur, 26 Februari 1994
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Kel. Kapalo Koto, Pasar Baru Padang
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Lama Penelitian	: 3 (tiga) Bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Sebelum dan Setelah Sistem Pembayaran Pajak Secara Online
Tempat Penelitian	: DPKA Kota Padang Dan BPS Kota Padang
Anggota Rombongan	: --

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/ Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah setempat/ lokasi Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Walikota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang dalam kesempatan pertama.
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/ tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 17 April 2015

AN. WALIKOTA PADANG

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KASIBIPOLTEKLOGI DAN WASBANG



K. LUCKY DHARMA Y.P. M.Si

NIP. 19680703 199308 1 001

Diteruskan kepada Yth:

1. Kepala FE Unand Padang
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pembayaran *online* Pajak Daerah di Kota Padang ?
2. Bagaimana alur pembayaran secara *online* Pajak Daerah di Kota Padang ?
3. Apa saja Pajak Daerah yang dibayar secara *online* ?
4. Bagaimana penerimaan Pajak Daerah setelah menggunakan sistem online ?